PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI UMKM BUAH MANGROVE OLEH DINAS PERTANIAN DI KABUPATEN SUPIORI PROVINSI PAPUA

Standly Vincen S Mandosir
NPP. 33.1168
Program Studi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat
Email: standlymdr@gmail.com

Pembimbing Skripsi:
Email: marzukia234@gmail.com

ABSTRACT

Problem statement: *Supiori Regency has quite large mangrove resource potential with a mangrove forest area of ±3,105.83 hectares spread across the coastal area.. However, this potential has not been optimally utilized to support the economic development of coastal communities. Most mangrove fruit processing activities are still carried out at the household level, using simple equipment, and lack adequate marketing support. Furthermore, the number of mangrove-based MSMEs remains limited, and the quality of their products is not yet competitive in the broader market.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze the role of the Supiori Regency Agriculture Service in community empowerment through the development of mangrove-based MSMEs.* ***Method:*** *This research uses a descriptive qualitative approach with a postpositivism paradigm. Data collection techniques include in-depth interviews, field observations, and documentation. Data analysis uses the Miles and Huberman interactive model, which includes data reduction, data display, and conclusion drawing and verification. Data validity is ensured through source, technique, and time triangulation.* ***Results:*** *The results show that: (1) The role of the Supiori Regency Agricultural Service is still partial as a facilitator of production facilities (grater machine assistance) and marketing through exhibitions, but it has not been optimal.* ***Conclusion:*** *The conclusion of this research is that community empowerment through mangrove fruit MSMEs in Supiori Regency is in a transition stage from a charity-based approach towards empowerment. The success of the program is largely determined by the commitment of the local government in providing legal protection, continuous training, and market access expansion that is no longer fully dependent on the government's agenda.*

Keywords: Community Empowerment, MSMEs, Mangrove Fruit, Agricultural Service, Supiori Regency

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian): Kabupaten Supiori memiliki potensi sumber daya mangrove yang cukup besar dengan luas hutan mangrove mencapai ±3.105,83 hektare yang tersebar di wilayah pesisir**.** Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal untuk

mendukung pengembangan ekonomi masyarakat pesisir. Sebagian besar aktivitas pengolahan buah mangrove masih dilakukan dalam skala rumah tangga, menggunakan peralatan sederhana, serta belum didukung oleh sistem pemasaran yang memadai. Selain itu, jumlah pelaku UMKM berbasis buah mangrove masih terbatas dan kualitas produk yang dihasilkan belum mampu bersaing di pasar yang lebih luas. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Pertanian Kabupaten Supiori dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan UMKM berbasis buah mangrove**. Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan paradigma postpositivisme. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Validitas data dijamin melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Pertanian Kabupaten Supiori masih bersifat parsial sebagai fasilitator sarana produksi (bantuan mesin parut) dan pemasaran melalui pameran, namun belum optimal. **Kesimpulan:** Kesimpulan penelitian ini adalah pemberdayaan masyarakat melalui UMKM buah mangrove di Kabupaten Supiori berada pada tahap transisi dari pendekatan berbasis bantuan menuju pemberdayaan. Keberhasilan program sangat ditentukan oleh komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan payung hukum, pelatihan berkelanjutan, dan perluasan akses pasar yang tidak lagi bergantung sepenuhnya pada agenda pemerintah.

Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat, UMKM, Buah Mangrove, Dinas Pertanian, Pembangunan Ekonomi Lokal, Kabupaten Supiori

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir merupakan salah satu fokus pembangunan daerah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi ketergantungan pada sektor ekonomi tradisional (Sulistiyani, 2004). Kabupaten Supiori sebagai wilayah kepulauan di Provinsi Papua memiliki karakteristik sosial ekonomi yang sebagian besar masih bergantung pada pemanfaatan sumber daya alam seperti perikanan dan pertanian rakyat (Dulyakasem dkk., 2026). Ketergantungan ini menyebabkan kegiatan ekonomi masyarakat cenderung bersifat subsisten sehingga belum mampu memberikan nilai tambah yang optimal terhadap peningkatan pendapatan dan kualitas hidup masyarakat pesisir. Salah satu potensi ekonomi lokal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat kemandirian masyarakat pesisir di Kabupaten Supiori adalah pemanfaatan mangrove sebagai sumber bahan baku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) (Nawar dkk., 2022). Hutan mangrove memiliki peran penting tidak hanya sebagai penyangga ekosistem pesisir, tetapi juga sebagai penyedia bahan pangan alternatif yang dapat diolah menjadi produk bernilai tambah. Pemanfaatan buah mangrove, khususnya jenis *Bruguiera gymnorrhiza (avon),* telah dilakukan secara tradisional oleh sebagian masyarakat sebagai bahan dasar tepung dan makanan lokal, sehingga menunjukkan adanya peluang ekonomi yang dapat dikembangkan lebih jauh melalui kegiatan UMKM berbasis hasil hutan bukan kayu (Setiawan, 2025).

Data yang diolah dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua pada tahun 2010 menunjukkan bahwa luas hutan mangrove di Kabupaten Supiori sebesar kurang lebih 3,105.83 Ha. Ini menunjukkan adanya peluang besar untuk mendorong pemberdayaan masyarakat

melalui UMKM berbasis sumber daya lokal, terutama pemanfaatan buah mangrove sebagai produk olahan bernilai tambah (Tambunan, 2012). Meskipun data spesifik mengenai jumlah UMKM dan luas hutan mangrove di Kabupaten Supiori belum tersedia secara rinci dalam publikasi BPS, dominasi sektor pertanian dan perikanan dalam struktur ekonomi daerah menjadi indikasi bahwa pengembangan UMKM berbasis mangrove memiliki prospek yang kuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dalam konteks pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal, Dinas Pertanian Kabupaten Supiori memiliki peran strategis dalam melakukan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan UMKM olahan buah mangrove (Soekanto, 2012). Peran tersebut diwujudkan melalui kegiatan pembinaan, pelatihan teknis pengolahan hasil mangrove, penyediaan sarana produksi, serta fasilitasi perizinan dan pemasaran produk. Namun, upaya tersebut hingga saat ini masih belum berjalan secara optimal, ditunjukkan dengan masih terbatasnya jumlah pelaku UMKM yang memanfaatkan buah mangrove, rendahnya kualitas produk olahan, serta belum tersedianya akses pasar yang lebih luas (Tampubolon, 2020). Hal ini menegaskan perlunya peran Dinas Pertanian yang lebih intensif, terarah, dan berkelanjutan dalam mendorong perkembangan UMKM mangrove di Kabupaten Supiori (Marzuki, 2016).

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (*Research Gap*)

Penelitian ini membahas mengenai bagaimana peran Dinas Pertanian Kabupaten Supiori dalam pengembangan UMKM yang berbasis buah mangrove. Kabupaten Supiori memiliki potensi sumber daya mangrove yang cukup besar dengan luas hutan mangrove mencapai ±3.105,83 hektare yang tersebar di wilayah pesisir. Buah mangrove, khususnya jenis *Bruguiera gymnorrhiza* (avon), telah lama dimanfaatkan masyarakat sebagai bahan pangan tradisional dan memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi berbagai produk olahan bernilai ekonomi. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pengembangan ekonomi masyarakat pesisir. Sebagian besar aktivitas pengolahan buah mangrove masih dilakukan dalam skala rumah tangga, menggunakan peralatan sederhana, serta belum didukung oleh sistem pemasaran yang memadai (Zsazsa, 2022). Selain itu, jumlah pelaku UMKM berbasis buah mangrove masih terbatas dan kualitas produk yang dihasilkan belum mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Permasalahan lainnya adalah belum optimalnya peran pemerintah daerah, khususnya Dinas Pertanian Kabupaten Supiori, dalam melakukan pembinaan, pendampingan, penguatan kapasitas usaha, fasilitasi akses pasar, serta pengembangan kelembagaan UMKM berbasis mangrove. Meskipun berbagai program pemberdayaan telah dilakukan, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia, aksesibilitas wilayah kepulauan, minimnya inovasi produk, serta belum terbangunnya jaringan pemasaran yang berkelanjutan. Akibatnya, tujuan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pesisir belum tercapai secara optimal.

Di sisi lain, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hasanah et al. (2022), Hasan et al. (2022), dan Wibowo et al. (2023) lebih banyak berfokus pada aspek teknis pemanfaatan dan pengolahan buah mangrove menjadi berbagai produk ekonomi seperti sirup, permen jelly, kopi mangrove, maupun pewarna alami batik. Penelitian-penelitian tersebut membuktikan bahwa mangrove memiliki nilai tambah ekonomi yang tinggi bagi masyarakat, namun belum secara

mendalam mengkaji bagaimana peran pemerintah daerah dalam mengembangkan dan memberdayakan UMKM berbasis mangrove secara berkelanjutan.

Selain itu, penelitian Adhipramana dan Radjikan (2023) memang telah mengkaji peran pemerintah daerah dalam pengelolaan mangrove, tetapi fokus penelitian tersebut berada pada pengembangan wisata hutan mangrove, bukan pada pemberdayaan masyarakat melalui UMKM berbasis hasil hutan bukan kayu (HHBK). Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan kebijakan (policy gap) terkait belum banyaknya penelitian yang membahas peran pemerintah daerah sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator dalam pengembangan UMKM buah mangrove.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini memiliki urgensi tinggi karena Kabupaten Supiori memiliki luas hutan mangrove yang berpotensi besar dan bernilai ekonomi, tetapi pemanfaatannya masih belum maksimal sebagai sumber kehidupan masyarakat yang tinggal di pesisir. Hal ini mengakibatkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah yang berbasis pada sumber daya lokal belum dimanfaatkan dengan optimal. Dilihat dari sudut pandang kebijakan publik, studi ini memiliki relevansi yang tinggi karena memberikan wawasan empiris tentang seberapa efektif pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi untuk memberdayakan masyarakat, sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Temuan dari penelitian ini dapat dijadikan dasar bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif dan berkelanjutan untuk mendukung perekonomian masyarakat pesisir. Dari sisi akademis, penelitian ini memiliki signifikansi yang penting karena memperluas catatan mengenai pemberdayaan masyarakat pesisir di bagian timur Indonesia yang masih cukup terbatas. Penelitian ini juga memberikan kontribusi bagi pengembangan teori Pembangunan Ekonomi Lokal dengan menyajikan bukti empiris tentang hubungan antara potensi lokal, struktur kelembagaan pemerintah, partisipasi masyarakat, dan kemandirian ekonomi. Secara praktis, penelitian ini menjadi relevan karena menyarankan strategi untuk memperkuat legalitas, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, mengembangkan akses ke pasar, mengintegrasikan ekowisata mangrove, serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan sebagai langkah nyata menuju pemberdayaan masyarakat yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya dirancang untuk menyajikan temuan-temuan dari tulisan-tulisan terdahulu yang telah diselesaikan oleh peneliti dan disajikan dengan cara yang mencakup argumentasi. Lebih jauh lagi, hasil-hasil tulisan yang disajikan memiliki hubungan yang signifikan dengan tema tulisan yang dipilih oleh peneliti. Hasanah dkk. (2022) membahas mengenai pemberdayaan masyarakat dalam pengolahan mangrove menjadi permen jelly dan sirup sebagai upaya peningkatan pendapatan masyarakat Desa Kota Pari, Kecamatan Pantai Cermin. Penelitian ini menitikberatkan pada aspek teknis dan sosial melalui pelatihan langsung kepada masyarakat, sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis peran pemerintah daerah, khususnya Dinas Pertanian Kabupaten Supiori, dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan UMKM berbasis buah mangrove. Selanjutnya, Hasan dkk. (2022) membahas

mengenai pemanfaatan buah mangrove menjadi kopi mangrove di Kecamatan Anggrek, Gorontalo Utara. Penelitian ini menitikberatkan pada pengolahan teknis buah mangrove menjadi kopi mangrove, dengan orientasi pengabdian dan edukasi masyarakat. Selanjutnya, Wibowo dkk. (2023) menjelaskan tentang pemanfaatan buah mangrove sebagai bahan warna alami batik pada kelompok UMKM Batik di Karimun Jawa, Jepara, Jawa Tengah, menggunakan pendekatan bersifat praktif dan aplikatif tanpa meneliti peran kelembagaan atau kebijakan pemerintah. Penelitian ini menitikberatkan pada pengolahan teknis buah mangrove menjadi kopi mangrove, dengan orientasi pengabdian dan edukasi masyarakat. Terakhir, Adhipramana dkk. (2023) membahas peran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam pengembangan hutan wisata mangrove di Wonorejo. Penelitian ini berfokus pada pengembangan wisata mangrove di kawasan Wonorejo, Surabaya, dengan menitikberatkan pada aspek pariwisata, infrastruktur, dan daya tarik wisata alam,serta menyoroti fungsi DKPP sebagai pengelola wisata dan pelaku promosi ekowisata.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Kebaruan ilmiah penelitian ini terletak pada analisis pemberdayaan masyarakat melalui UMKM buah mangrove yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Supiori Provinsi Papua menggunakan perspektif Teori Pembangunan Ekonomi Lokal (Local Economic Development/LED) yang dikemukakan oleh Malizia, Feser, dan DeVol (2019). Penelitian ini tidak hanya mengkaji pemanfaatan buah mangrove sebagai produk ekonomi, tetapi juga menganalisis keterkaitan antara pemanfaatan potensi lokal, peran pemerintah daerah, keterlibatan masyarakat, dan pencapaian kemandirian ekonomi masyarakat pesisir dalam satu kerangka pembangunan ekonomi lokal yang terintegrasi. Pendekatan tersebut belum ditemukan secara komprehensif pada penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini. Secara teoritis, penelitian Hasanah et al. (2022) berfokus pada peningkatan keterampilan masyarakat melalui pelatihan pengolahan buah mangrove menjadi produk pangan bernilai ekonomi. Penelitian tersebut menggunakan perspektif pemberdayaan masyarakat berbasis pelatihan dan transfer keterampilan. Sementara itu, penelitian ini menggunakan Teori Pembangunan Ekonomi Lokal (LED) yang lebih luas dengan menganalisis hubungan antara potensi lokal, kapasitas masyarakat, peran pemerintah daerah, serta dampaknya terhadap kemandirian ekonomi masyarakat pesisir. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat hasil pelatihan, tetapi juga menelaah proses pembangunan ekonomi lokal yang terjadi melalui intervensi pemerintah daerah.

Perbedaan juga terlihat pada penelitian Hasan et al. (2022) yang mengkaji pemanfaatan buah mangrove sebagai bahan baku produk olahan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir. Fokus penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek nilai tambah ekonomi produk mangrove. Sebaliknya, penelitian ini menempatkan pemerintah daerah sebagai aktor utama yang berperan dalam merancang kebijakan, memberikan pendampingan, membuka akses pasar, dan memperkuat kapasitas pelaku UMKM. Dengan demikian, penelitian ini memperluas perspektif dari sekadar pengolahan produk menjadi analisis tata kelola pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi lokal. Berbeda dengan penelitian Wibowo et al. (2023) yang menyoroti inovasi produk kopi mangrove sebagai strategi peningkatan ekonomi masyarakat, penelitian ini tidak berfokus pada satu jenis produk tertentu, melainkan pada keseluruhan proses pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan UMKM berbasis buah

mangrove. Selain itu, penelitian Wibowo et al. lebih menekankan aspek kewirausahaan dan inovasi produk, sedangkan penelitian ini mengkaji bagaimana sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat mampu menciptakan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan.

Selanjutnya, penelitian Adhipramana dan Radjikan (2023) memang membahas peran pemerintah daerah dalam pengelolaan kawasan mangrove, namun objek kajiannya adalah pengembangan wisata mangrove sebagai destinasi ekowisata. Penelitian tersebut belum mengkaji pengembangan UMKM berbasis hasil hutan bukan kayu (HHBK) maupun proses pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui produk olahan mangrove. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan pada aspek objek penelitian, yaitu pengembangan UMKM buah mangrove sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir yang difasilitasi oleh pemerintah daerah.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Pertanian Kabupaten Supiori dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan UMKM berbasis buah mangrove.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pemilihan metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini karena fokus penelitian ini adalah memahami dan menggambarkan peran Dinas Pertanian Kabupaten Supiori dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan UMKM berbasis buah mangrove serta menggali makna, proses, serta dinamika sosial dan kebijakan yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat pesisir (Moleong, 2017). Sehingga melalui pendekatan ini diharapkan dapat menggambarkan secara mendalam fenomena pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan UMKM buah mangrove oleh Dinas Pertanian Kabupaten Supiori. Penelitian ini menggunakan paradigma postpositivisme karena fenomena pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan UMKM olahan buah mangrove di Kabupaten Supiori tidak hanya dapat dijelaskan melalui data objektif, tetapi memerlukan pemahaman mendalam terhadap makna, persepsi, dan pengalaman para pelaku di lapangan (Nasution, 2012). Informan penelitian dipilih secara *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan informan dengan pertimbangan tertentu sesuai kebutuhan penelitian. Artinya, informan yang dipilih benar-benar dianggap memahami permasalahan dan dapat memberikan informasi yang diperlukan oleh peneliti. Informan dalam penelitian ini merupakan subjek yang dapat berkontribusi memberikan bantuan kepada peneliti untuk mendapatkan informasi terkait penelitian yang dilakukan serta permasalahan di lapangan yakni mengenai pemberdayaan masyarakat melalui UMKM buah mangrove oleh Dinas Pertanian di Kabupaten Supiori. Namun disamping itu, teknik *accidental sampling* juga akan digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data apabila secara tidak sengaja bertemu dengan seseorang yang bersedia untuk memberikan informasi atau data yang dibutuhkan (Sugiyono, 2022).

Untuk penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi data untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, yakni wawancara, observasi dan dokumentasi. Peneliti menggunakan teknik wawancara semi-terstruktur secara mendalam sehingga memperoleh informasi secara luas dari informan mengenai peran Dinas Pertanian dalam pemberdayaan masyarakat melalui UMKM buah mangrove. Kemudian, data yang diperoleh dari observasi antara lain proses pelaksanaan program pemberdayaan, aktivitas pengolahan dan pemasaran

produk buah mangrove, dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelatihan atau pendampingan. Adapun dokumen yang diperoleh melalui teknik dokumentasi antara lain laporan kegiatan, data statistik, foto kegiatan, dan dokumen peraturan.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles and Huberman, yaitu proses analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam waktu tertentu (Miles & Huberman, 1994). Adapun tahap yang pertama adalah Pengumpulan Data yang didapatkan dari hasil wawancara dan dokumentasi yang dicatat dalam catatan di lapangan. Data yang sudah diperoleh dari berbagai dokumen berdasarkan kategorisasi yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian yang dikemudian dikembangkan penajaman data pada pencarian data berikutnya. Selanjutnya, tahapan reduksi data yakni penyederhanaan, pemilihan, dan pengelompokan data yang diperoleh dari lapangan untuk memfokuskan pada informasi-informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, tahap Penyajian Data dimana data yang telah direduksi dan diolah disusun dan disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami, sehingga peneliti dan pembaca dapat melihat pola atau makna dari data tersebut. Penyajian data bertujuan untuk memudahkan analisis lebih lanjut dan memudahkan dalam pengambilan kesimpulan. Penyajian data sendiri dapat berupa tabel, grafik, matriks, narasi deskriptif serta peta atau sketsa. Kemudian, tahap terakhir yakni penarikan kesimpulan untuk menafsirkan temuan data berdasarkan hasil wawancara atau dokumen. Kesimpulan diambil melalui data yang diperoleh pada awal hingga akhir penelitian, kemudian diverifikasi untuk memastikan keabsahan data yang diperoleh sehingga simpulan akhir dapat dipertanggungjawabkan.

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pertanian Kabupaten Supiori, Provinsi Papua, selama tiga minggu mulai dari tanggal 5 Januari 2026-25 Januari 2026, yang mencakup proses pengumpulan data melalui wawancara dengan informan, observasi, dan mengalisis dokumen-dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian. Dengan rentang waktu tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan peran Dinas Pertanian dalam memberdayakan masyarakat melalui pengembangan UMKM khususnya buah mangrove.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pemberdayaan Masyarakat Melalui UMKM Buah Mangrove oleh Dinas Pertanian di Kabupaten Supiori Provinsi Papua

Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) buah mangrove di Kabupaten Supiori merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pemanfaatan potensi sumber daya lokal yang tersedia. Kabupaten Supiori 58 memiliki kawasan mangrove yang cukup luas dan berpotensi untuk dikembangkan sebagai sumber ekonomi masyarakat. Namun demikian, berdasarkan kondisi awal yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, pemanfaatan buah mangrove oleh masyarakat masih terbatas dan belum dikembangkan secara optimal sebagai kegiatan ekonomi produktif. Pengembangan UMKM berbasis buah mangrove menjadi salah satu strategi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Supiori. Hal ini dilakukan dengan mendorong masyarakat pesisir untuk memanfaatkan buah mangrove sebagai bahan baku produk olahan yang memiliki nilai ekonomi. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat serta membuka peluang usaha baru bagi masyarakat pesisir. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara,

observasi, dan dokumentasi, pemberdayaan masyarakat melalui UMKM buah mangrove telah dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Supiori melalui beberapa kegiatan seperti pelatihan pengolahan buah mangrove, pembentukan kelompok usaha, serta pendampingan kepada masyarakat.

3.1.1. Pemanfaatan Potensi Lokal

Pemanfaatan potensi lokal merupakan upaya mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki daerah untuk menciptakan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, Kabupaten Supiori memiliki potensi sumber daya mangrove yang cukup besar dan tersebar di berbagai wilayah pesisir. Potensi tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai bahan baku utama dalam pengolahan berbagai produk UMKM seperti sirup mangrove, dodol mangrove, keripik mangrove, selai mangrove, dan berbagai produk olahan lainnya yang memiliki nilai ekonomi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pertanian Kabupaten Supiori telah berupaya mendorong pemanfaatan potensi lokal melalui kegiatan pelatihan pengolahan buah mangrove, pemberian pendampingan teknis, serta pengenalan inovasi produk kepada masyarakat. Upaya tersebut dilakukan agar masyarakat tidak hanya memanfaatkan mangrove sebagai sumber daya alam semata, tetapi juga sebagai komoditas ekonomi yang mampu meningkatkan pendapatan rumah tangga. Selain itu, pemanfaatan mangrove sebagai bahan baku produk UMKM juga mendukung upaya pelestarian lingkungan karena masyarakat mulai memahami pentingnya menjaga keberlanjutan ekosistem mangrove sebagai sumber penghidupan. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan potensi lokal belum dilakukan secara optimal. Masih terdapat masyarakat yang belum memiliki keterampilan pengolahan produk yang memadai, keterbatasan peralatan produksi, serta minimnya inovasi produk yang mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Kondisi tersebut menyebabkan pemanfaatan sumber daya mangrove belum mampu menghasilkan nilai tambah ekonomi yang maksimal bagi masyarakat pesisir.

Berdasarkan perspektif Pembangunan Ekonomi Lokal, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan potensi lokal telah berjalan namun masih memerlukan penguatan pada aspek inovasi produk, pengembangan teknologi pengolahan, dan perluasan akses pasar. Potensi mangrove yang melimpah seharusnya dapat menjadi basis pengembangan ekonomi lokal yang berkelanjutan apabila dikelola secara profesional dan didukung oleh berbagai pemangku kepentingan.

3.1.2. Peran Pemerintah Daerah

Peran pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam keberhasilan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan UMKM buah mangrove. Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Pertanian Kabupaten Supiori telah melaksanakan berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola dan mengembangkan usaha berbasis mangrove. Program tersebut meliputi pelatihan pengolahan produk, penyuluhan, pendampingan kelompok usaha, serta fasilitasi pengembangan UMKM masyarakat pesisir.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menjalankan fungsi sebagai fasilitator, regulator, dan motivator dalam proses pemberdayaan masyarakat. Sebagai fasilitator, Dinas Pertanian memberikan pelatihan dan pendampingan kepada kelompok usaha masyarakat. Sebagai regulator, pemerintah daerah menyusun berbagai program yang mendukung pengembangan UMKM serta memasukkan pemberdayaan masyarakat ke dalam

agenda pembangunan daerah. Sementara sebagai motivator, pemerintah daerah berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai potensi ekonomi yang dimiliki sumber daya mangrove. Meskipun demikian, pelaksanaan peran pemerintah daerah masih menghadapi berbagai kendala. Keterbatasan anggaran, minimnya tenaga pendamping lapangan, serta keterbatasan sarana dan prasarana menjadi hambatan dalam pelaksanaan program pemberdayaan. Selain itu, koordinasi lintas sektor antara organisasi perangkat daerah yang terkait juga belum sepenuhnya berjalan secara optimal sehingga beberapa program pengembangan UMKM masih dilaksanakan secara parsial.

Berdasarkan teori Pembangunan Ekonomi Lokal, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif dan mendukung pengembangan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sinergi antarlembaga pemerintah, peningkatan dukungan anggaran, serta penguatan kebijakan yang berorientasi pada pengembangan UMKM berbasis potensi lokal agar tujuan pemberdayaan masyarakat dapat tercapai secara optimal.

3.1.3. Keterlibatan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat merupakan unsur utama dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui UMKM buah mangrove. Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat Kabupaten Supiori menunjukkan partisipasi yang cukup baik dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian. Bentuk keterlibatan masyarakat terlihat melalui keikutsertaan dalam pelatihan, kegiatan pengolahan produk, pembentukan kelompok usaha, serta kegiatan pemasaran produk hasil olahan mangrove.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat telah memiliki kesadaran mengenai pentingnya pemanfaatan sumber daya mangrove sebagai sumber pendapatan alternatif. Kesadaran tersebut mendorong masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam berbagai program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Selain itu, budaya gotong royong yang masih kuat di masyarakat Supiori turut mendukung pelaksanaan berbagai kegiatan kelompok usaha secara bersama-sama. Namun demikian, tingkat partisipasi masyarakat belum sepenuhnya merata. Masih terdapat sebagian masyarakat yang kurang aktif mengikuti kegiatan pemberdayaan karena keterbatasan pengetahuan, rendahnya tingkat pendidikan, serta persepsi bahwa usaha pengolahan mangrove belum mampu memberikan keuntungan yang signifikan. Selain itu, sebagian kelompok usaha masih bergantung pada bantuan pemerintah sehingga inisiatif masyarakat untuk mengembangkan usaha secara mandiri belum sepenuhnya terbentuk.

Dalam perspektif Pembangunan Ekonomi Lokal, keterlibatan masyarakat merupakan fondasi utama dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan usaha, maka semakin besar peluang keberhasilan program pemberdayaan yang dilaksanakan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan yang berkelanjutan, penguatan kelembagaan kelompok usaha, serta peningkatan akses informasi mengenai peluang pengembangan usaha berbasis mangrove.

3.1.4. Kemandirian Ekonomi

Kemandirian ekonomi merupakan tujuan akhir dari pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan UMKM buah mangrove. Berdasarkan hasil penelitian, pengembangan UMKM mangrove telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat meskipun belum signifikan. Sebagian masyarakat telah memperoleh

tambahan penghasilan dari kegiatan pengolahan dan penjualan produk mangrove sehingga mampu membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan UMKM mangrove telah membuka peluang usaha baru bagi masyarakat pesisir yang sebelumnya sangat bergantung pada sektor perikanan dan pekerjaan musiman lainnya. Diversifikasi sumber pendapatan tersebut menjadi salah satu indikator meningkatnya kemampuan ekonomi masyarakat. Selain itu, beberapa kelompok usaha telah mampu memasarkan produknya di luar wilayah Kabupaten Supiori meskipun masih dalam skala terbatas. Akan tetapi, tingkat kemandirian ekonomi masyarakat masih belum optimal. Keterbatasan akses pasar, rendahnya kapasitas produksi, kurangnya legalitas usaha dan sertifikasi produk, serta keterbatasan modal usaha masih menjadi kendala utama dalam pengembangan UMKM mangrove. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian besar usaha masih berada pada skala rumah tangga dan belum mampu berkembang menjadi usaha yang lebih kompetitif.

Berdasarkan teori Pembangunan Ekonomi Lokal, kemandirian ekonomi tidak hanya diukur dari peningkatan pendapatan masyarakat, tetapi juga dari kemampuan masyarakat dalam mengelola usaha secara berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing produk lokal. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan UMKM melalui fasilitasi akses permodalan, pengembangan jaringan pemasaran, peningkatan kualitas produk, serta penguatan kelembagaan usaha agar masyarakat mampu mencapai kemandirian ekonomi yang lebih baik dan berkelanjutan**.**

3.2. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui UMKM buah mangrove oleh Dinas Pertanian Kabupaten Supiori telah dilaksanakan melalui pemanfaatan potensi lokal, pendampingan masyarakat, pelatihan pengolahan produk, serta dukungan terhadap pengembangan usaha masyarakat pesisir, namun pelaksanaannya belum optimal karena masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, akses pasar, permodalan, dan keberlanjutan usaha. Temuan ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat tidak hanya membutuhkan kemampuan teknis dalam mengolah produk, tetapi juga memerlukan dukungan kelembagaan, kebijakan, dan penguatan kapasitas ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Sama halnya dengan temuan penelitian Uswatun Hasanah, Faried, dan Sembiring (2022) yang menyatakan bahwa pengolahan mangrove menjadi produk bernilai ekonomi mampu meningkatkan kreativitas dan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat, penelitian ini juga menemukan bahwa pengolahan buah mangrove menjadi berbagai produk UMKM memberikan alternatif sumber pendapatan bagi masyarakat pesisir Kabupaten Supiori. Temuan ini memperkuat hasil penelitian sebelumnya bahwa pemanfaatan sumber daya mangrove dapat menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat apabila didukung oleh pelatihan dan pengembangan kapasitas masyarakat. Namun demikian, penelitian ini menemukan dimensi yang lebih luas karena tidak hanya melihat keberhasilan masyarakat dalam menghasilkan produk, tetapi juga menganalisis peran Dinas Pertanian sebagai fasilitator dalam proses pemberdayaan masyarakat.

Temuan penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Wahyudin Hasan dkk. (2022) yang menemukan bahwa pelatihan pemanfaatan buah mangrove mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai potensi ekonomi mangrove dan membuka peluang usaha baru bagi

masyarakat pesisir. Sama halnya dengan temuan penelitian sebelumnya, masyarakat di Kabupaten Supiori memperoleh manfaat melalui pelatihan dan pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga memiliki kemampuan mengolah buah mangrove menjadi produk yang memiliki nilai jual. Temuan ini memperkuat penelitian Wahyudin Hasan dkk. (2022) bahwa peningkatan kapasitas masyarakat merupakan langkah awal yang penting dalam proses pemberdayaan ekonomi berbasis sumber daya lokal. Akan tetapi, penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan pelatihan saja belum cukup apabila tidak diikuti dengan dukungan pemasaran, akses permodalan, dan pembinaan usaha yang berkelanjutan. Temuan penelitian ini juga memperkuat hasil penelitian Drajad Wibowo dkk. (2023) yang menyatakan bahwa pemanfaatan buah mangrove dapat mendorong lahirnya inovasi produk sekaligus mendukung ekonomi berkelanjutan. Sama halnya dengan penelitian tersebut, penelitian ini menemukan bahwa buah mangrove tidak hanya memiliki nilai ekologis, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang dapat dikembangkan menjadi berbagai produk UMKM. Namun demikian, berbeda dengan penelitian Drajad Wibowo dkk. (2023) yang berfokus pada inovasi produk pewarna alami batik, penelitian ini menemukan bahwa keberhasilan inovasi produk di Kabupaten Supiori sangat bergantung pada dukungan pemerintah daerah dalam menyediakan pendampingan, fasilitasi pemasaran, dan penguatan kelompok usaha masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini memperluas temuan sebelumnya dengan menunjukkan pentingnya peran pemerintah dalam menciptakan ekosistem pemberdayaan yang berkelanjutan.

Berbeda dengan temuan penelitian Adhipramana dan Radjikan (2023) yang menunjukkan bahwa peran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya dalam pengembangan wisata Hutan Mangrove Wonorejo relatif berhasil melalui pengembangan atraksi wisata dan promosi digital, penelitian ini menemukan bahwa peran Dinas Pertanian Kabupaten Supiori lebih difokuskan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan UMKM berbasis buah mangrove. Temuan ini menolak asumsi bahwa pengelolaan mangrove selalu berorientasi pada sektor pariwisata. Pada konteks Kabupaten Supiori, mangrove justru dimanfaatkan sebagai sumber bahan baku ekonomi produktif yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir. Perbedaan temuan tersebut terjadi karena perbedaan karakteristik objek penelitian, di mana Surabaya merupakan kawasan perkotaan yang memiliki potensi wisata dan infrastruktur yang lebih maju, sedangkan Kabupaten Supiori merupakan wilayah kepulauan yang lebih membutuhkan penguatan ekonomi masyarakat berbasis sumber daya lokal. Temuan lain yang menjadi kontribusi penting penelitian ini adalah bahwa keberhasilan pemberdayaan masyarakat melalui UMKM buah mangrove tidak hanya ditentukan oleh kemampuan masyarakat dalam mengolah produk, tetapi juga oleh sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, kelompok usaha, dan kebijakan pembangunan daerah. Temuan ini berbeda dengan sebagian besar penelitian terdahulu yang lebih berfokus pada hasil pelatihan atau inovasi produk. Penelitian ini menunjukkan bahwa keberlanjutan program pemberdayaan sangat dipengaruhi oleh faktor kelembagaan, dukungan regulasi, akses pasar, dan pendampingan usaha secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan perspektif baru bahwa pemberdayaan masyarakat berbasis mangrove perlu dipandang sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi lokal, bukan sekadar kegiatan pelatihan atau pengabdian masyarakat semata.

IV. KESIMPULAN

Peran Dinas Pertanian Kabupaten Supiori dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan UMKM berbasis buah mangrove telah berjalan, namun belum optimal dan masih bersifat parsial. Peran yang telah dilaksanakan meliputi tiga hal utama. Pertama, sebagai fasilitator sarana produksi, Dinas Pertanian telah memberikan bantuan fisik berupa mesin parut kepada kelompok UMKM. Bantuan ini terbukti meningkatkan efisiensi produksi dibandingkan cara manual yang memakan waktu lebih lama. Kedua, sebagai fasilitator pemasaran, Dinas Pertanian menjembatani pemasaran produk melalui keterlibatan dalam pameran-pameran dan bekerja sama dengan Dinas Koperasi sebagai perpanjangan tangan 83 pemasaran. Ketiga, sebagai koordinator lintas sektor, Dinas Pertanian membangun sinergi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) untuk aspek konservasi, serta Dinas Koperasi untuk aspek kelembagaan dan pemasaran.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni pada waktu dan biaya penelitian. Selain itu, penelitian ini juga hanya dilakukan pada satu organisasi perangkat daerah sebagai objek penelitian, Kemudian, penelitian ini dilakukan secara kualitatif sehingga data yang dihasilkan berpotensi mengandung subjektivitas dan tidak dapat diuji validitasnya.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Peneliti menyadari kekurangan pada penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan mengenai pemberdayaan masyarakat melalui UMKM buah mangrove oleh Dinas Pertanian di Kabupaten Supiori, Provinsi Papua sehingga ditemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih terutama peneliti tujukan kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Supiori, Provinsi Papua, beserta jajaran, yang telah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang telah membantu kelancaran pelaksanaan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Adhipramana, A. R., & Radjikan, R. (2023). Peran DKPP (Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian) Kota Surabaya dalam Pengembangan Wisata Hutan Mangrove Wonorejo. Jurnal Administrasi Publik Universitas Negeri Surabaya, 11(2). https://www.aksiologi.org/index.php/praja/article/view/1099

Dulyakasem, R., Brooks, C., Lehnert, S.L., Newton, P. (2026). *Community-based natural resource management in coastal communities: The contribution of mangroves to household livelihoods in southern Thailand*. Environmental Development, 57, 101340. https://doi.org/10.1016/j.envdev.2025.101340

Arikunto, S. (2013). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Rineka Cipta.

Hasanah, U., Faried, A.I., Sembiring, R. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Pengolahan Mangrove Menjadi Permen Jelly dan Sirup Mangrove Berbasis Nilai Jual Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat Desa Kota Pari. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 3(2). https://journal.universitaspahlawan.ac.id/cdj/article/view/5063/3524

Kabupaten Supiori Dalam Angka 2024 (2024). https://supiorikab.bps.go.id/id

Malizia, E. E., Feser, E. J., & DeVol, J. W. (2019). Understanding Local Economic Development. Routledge.

Marzuki, M. (2016). Reformasi birokrasi dan inovasi pemberdayaan masyarakat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, 42*(2), 11-24. https://doi.org/10.33701/jipwp.v42i2.146

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook. Sage Publications.

Moleong, L. J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya. 92

Nasution, S. (2012). Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. Tarsito.

Nawar, M. K., Basyuni, M., Hanum, C., & Siregar, E. (2022). *Bioprospecting opportunities of mangrove fruits for the coastal community in Lubuk Kertang and Pulau Sembilan, North Sumatra, Indonesia*. Asian Journal of Plant Sciences, 21(1), 145–153. https://doi.org/10.3923/ajps.2022.145.153

Peraturan Bupati Supiori Nomor 29 Tahun 2022 Tentang RPJMD Kabupaten Supiori Tahun 2021–2025 (2022).

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan (2021).

Setiawan, I. (2025). Development of institutional functions in government implementation in Cikeruh Village, Jatinangor District, Sumedang Regency. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, 51*(2). https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrKASjl.zlqRwIAYMPLQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1783394533/RO=10/RU=https%3a%2f%2fejournal.ipdn.ac.id%2fJIPWP%2farticle%2fview%2f5998%2f2417/RK=2/RS=uaiwvf_wM4ZtUiTnXsR2LcXDwqI-

Soekanto, S. (2012). Sosiologi: Suatu Pengantar. Rajawali Pers.

Sugiyono. (2022). Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sulistiyani, A. T. (2004). Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan. Gava Media.

Tambunan, T. T. H. (2012). UMKM di Indonesia: Isu-isu Penting. LP3ES.

Tampubolon, L. A. (2020). *Community empowerment in coastal community: A case study of social forestry in North Sumatra, Indonesia*. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, 6(1). https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2020.006.01.8

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) (2008).

Zsazsa, C. S. K. M. (2022). Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di Desa Naga Timbul Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, 48*(2), 179-188. https://doi.org/10.33701/jipwp.v48i2.2751